

PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR DALAM SEJARAH POLITIK INDONESIA 1930-1950

Nur Fadillah Fajri¹, Junita Yosephine Sinurat², Khoirul Istiana³

Birubinar03@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Jambi

Informasi Artikel

Article history:

Received April 23, 2024

Revised Mei 01, 2024

Accepted Juni 10, 2024

Available online Agustus, 2024

Kata Kunci :

Pemikiran, Muhammad Natsir, Sejarah Politik

Keywords:

Thought, Muhammad Natsir's, Political History 1930-1950



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright ©2023 by Author.

Published by Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemikiran Muhammad Natsir dalam perkembangan politik di Indonesia, Implementasi atau peran pemikiran Muhammad Natsir dalam perkembangan sejarah politik di Indonesia serta dampak pemikiran politik Muhammad Natsir dalam perkembangan sejarah politik Indonesia adanya aktifitas politik Indonesia mengalami penurunan pada tahun 1930 sebab peraturan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kondisi ini membuat Natsir berusaha memperjuangkan cita-cita negara Indonesia yaitu melepaskan diri dari belenggu penjajahan melalui pemikiran dan perjuangannya. Muhammad Natsir yang akrab dipanggil Pak Natsir ini adalah seorang politikus, ulama dan intelektual yang memiliki kesederhanaan dalam setiap kepemimpinannya. Ia terjun ke politik pertama pada tahun 1930. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber,

interpretasi dan historiografi. Data yang digunakan melalui studi pustaka yang didapat dari sumber buku yang ada di perpustakaan dan internet. Hasil penelitian ini ialah aktifitas dan pemikiran Natsir yang mendorong kegiatan politik Indonesia dapat hidup kembali seperti konsep demokrasi, sekularisme dan perjuangan beliau di sidang perlemen Republik Indonesia Serikat (RIS). Adapun dampak dari pemikiran yang dilakukan ialah paham sekularisme dalam politik Indonesia menjadi terkikis dan diganti dengan nilai-nilai demokrasi pancasila, Adanya aktifitas partai politik, dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

ABSTRACT

This research was conducted to find out understand Muhammad Natsir's thoughts on political developments in Indonesia, the implementation or role of Muhammad Natsir's thoughts in the development of political history in Indonesia and the impact of Muhammad Natsir's political thoughts on the development of Indonesian political history. This condition made Natsir try to fight for the ideals of the Indonesian state, namely breaking free from the shackles of colonialism through his thoughts and struggle. Muhammad Natsir, who is familiarly called Pak Natsir, is a politician, cleric and intellectual who has simplicity in all his leadership. He first entered politics in 1930. The research method used in the research is the historical research method which consists of heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The data used is through library research obtained from library and internet sources. The results of this research

are Natsir's activities and thoughts which encourage Indonesian political activities to come back to life, such as the concepts of democracy, secularism and his struggle in the parliamentary assembly of the Republic of the United States of Indonesia (RIS). Thus, the impact of the thinking carried out is that the notion of secularism in Indonesian politics is eroded and replaced with the democratic values of Pancasila, the existence of political party activities, and the return of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) from the United Republic of Indonesia (RIS).

PENDAHULUAN

Politik merupakan bagian yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan sistem Indonesia. Di setiap zaman, memiliki peristiwa sistem politik yang mengalami perubahan dan sepatutnya hangat untuk dibicarakan. Politik di Indonesia pada tahun 1930 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena pemerintahan Kolonial Belanda menjalankan kebijakan yang bersifat mengekang dan menindas masyarakat. Pada tahun 1935 di keluarkanlah aturan untuk membatasi pertemuan yang bertentangan dengan ketertiban umum. Sehingga terjadinya penurunan aktivitas politik di Indonesia pada masa kolonial Belanda.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai tonggak penting bagi suatu negara untuk menyatakan bahwa Indonesia sudah bebas dari belenggu penjajahan dan mengabarkan ke seluruh dunia. Tentunya jika berbicara tentang proklamasi, maka tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, menumpah darah dan menyumbangkan segenap jiwa raganya untuk tanah air. Muhammad Natsir salah satu tokoh dalam memperjuangkan gerakan dan perjuangan negara ini, selain itu juga beliau mengantarkan politik Indonesia di dunia internasional. Kemerdekaan bangsa ini adalah hasil jerih payah perjuangan rakyat untuk menuntut bahwasanya Indonesia sudah merdeka dari penjajahan *kolonialisme* dan *imperialisme*. Oleh sebab itu, Mohammad Natsir merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran sangat penting dalam memperjuangkan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat ke NKRI.

Berdasarkan pendapat penulis negara ini sudah mengalami krisis moral, krisis kesadaran kolektif untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkis yang merugikan kepentingan bersama. Tidak terlepas dari itu, dalam politik Indonesia baik di skala nasional maupun daerah telah terjadi praktik-praktik elit politik yang kurang bermoral, di tengah elit politik terjadi pertarungan kepentingan pribadi dan kelompok yang tidak mengindahkan siapa lawan dan siapa kawan. Hal ini, sejalan dengan prinsip politik Muhammad Natsir yang sebagaimana ia memiliki filsafat politik yang berbeda dengan orang lain yaitu lebih menekankan sikap kejujuran. Carilah kemenangan dalam politik tetapi musuh tidak merasa dikalahkan, seperti itu filsafatnya (ST. Rais Alamsyah :83).

Pemimpin politik Indonesia sudah lupa bahwa bangsa Indonesia memiliki ideologi negara, yaitu Pancasila yang menjadi pedoman kehidupan bangsa dan bernegara di setiap sila-sila. Akan tetapi, elit politik tidak berpikir lagi untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Mohammad Natsir turun langsung ke bidang politik untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila. seperti aktivitas sebagai pemimpin Partai Masyumi, mengajukan usulan pembentukan negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945.

Di Indonesia, perkembangan partai politik sudah cukup besar terutama di negara barat. Menurut Sinurat, perkembangan partai politik di negara-negara Barat

permulaannya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam perlemen seperti negara Prancis dan Inggris (Junita, 2017: 11).

Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia terdapat salah satu partai yang lahir yaitu partai Masyumi yang didirikan pada tahun 1945 melalui muktamar umat Islam. Partai Masyumi ini mendapatkan dukungan dari beberapa organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lain-lain. Dan organisasi ini menghantarkan partai Masyumi berkembang luas. Salah satu pendiri Partai ini ialah Natsir. Muhammad Natsir juga berusaha memperjuangkan cita-cita negara Indonesia yaitu mencerdaskan dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang selama ini menjadi penghalang bangsa Indonesia melalui mosi integralnya bahkan di usia yang sudah senja perjuangannya tidak pernah padam (Hefnita & M. Nasution, 2022: 48).

Selain itu juga Natsir dikenal tokoh intelektual Islam yang mampu mengkelaborasikan antara nilai-nilai yang terkandung dalam Islam terhadap demokrasi melalui pemikirannya yaitu demokrasi teistik yaitu menekankan sistem demokrasi tetapi tetap menjunjung nilai ketuhanan. Dan beliau juga menentang adanya penjajahan dan paham komunisme serta para tokoh penggagas ideologi itu, sehingga ia tidak gentar dan takut melakukan perdebatan dengan para pemimpin komunis dalam persidangan yang salah satunya sidang *konstituante*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah pendekatan studi kepustakaan dengan menerapkan metode sejarah yang terdiri dari heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan sejarah). Menurut Nina Herlina Lubis metode penelitian sejarah yaitu metode penelitian yang berfokus dalam mengkaji kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau manusia (Nina, 2020:20). Tujuannya untuk membuat merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif yang berguna untuk masa sekarang dan masa depan.

Dalam pengumpulan sumber data primer dan skunder melalui perpustakaan daerah Kabupaten Sarolangun, Perpustakaan Arsip dan Daerah Provinsi Jambi dan internet. Dari beberapa tersebut diharapkan memperoleh data tentang pemikiran dan perjuangan Muhammad Natsir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Politik Muhammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia

1. Latar Belakang Kondisi Politik Indonesia Tahun 1930

Seorang rakyat menganggap suatu kegiatan politik bermanfaat bagi seluruh warga negara karena prinsipnya negara Indonesia adalah demokrasi yang sebagian kegiatannya adalah politik. Namun Politik di Indonesia sudah mengalami penurunan semenjak tahun 1930, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu: *pertama* krisis ekonomi dan penerapan pembatasan untuk berkumpul. *kedua*, adanya pemberian hukuman oleh Gubernur Jendral De Jonge bagi rakyat yang melanggar karena bergabung dalam kegiatan nasional yang radikal dan partai yang bersikap kooperatif. Hal ini dibuktikan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Siantar dibubarkan pada tahun 1930 (Junita, 2017:14)

Kemudian faktor *ketiga* ialah pada tahun 1934, para tokoh nasional ditangkap oleh pemerintah Belanda dengan fitnah menghasut untuk melakukan pemberontakan.

Salah satunya ialah Sultan Syahrir, Muhammad Hatta yang merupakan tokoh PNI. Penangkapan ini terjadi pada tanggal 25 Januari 1934 setelah itu dimasukkan dalam penjara glodok. Kemudian Sultan Syahrir dan Moh. Hatta diasingkan ke Digul hal ini atas perintah Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 16 November 1934. Setelah tokoh-tokoh PNI di Siantar dibubarkan menyusul ditangkap dan dipenjarakannya Soekarno dan beberapa Partindo (Partai Indonesia), banyak bekas-bekas pendukung PNI yang bergabung dengan Pertindo. Partai tersebut dengan cepat hancur dan pada tahun 1936 membubarkan diri (Junita, 2017: 14).

Faktor *keempat* ialah, organisasi politik tidak berkembang dan terjadi pelarangan kegiatan rapat dan politik pada masa pemerintahan Jepang. Pada tanggal 20 Maret 1942 dan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1942 pada tanggal 8 September 1942. Undang-undang tersebut berbunyi: "Pemerintah militer (*Gunseikan*) langsung mengawasi perkebunan, sedangkan perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya ditutup" (Sagimun MD :68)

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya aktifitas politik dizaman pendudukan Hindia Belanda dan pemerintahan Jepang mengalami pemerosotan. Demikian daripada itu pada dasarnya aktifitas berkumpul, berserikat dan menyuarakan pendapat melalui bidang politik sangat perlu untuk diterapkan khususnya di negara Indonesia. Dengan demikian, politik dalam pengambilan keputusan dan pembagian kekuasaan dapat berjalan dengan terbuka sesuai asas pancasila. Usaha yang dilakukan untuk mengembalikan aktifitas politik di Indonesia agar terjadi perbaikan. Untuk itu, perlunya dukungan dan kontribusi dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri dan adanya hubungan timbal balik sehingga aktivitas berkumpul seperti bidang politik menyuarakan aspirasi tidak dilarang lagi.

2. Riwayat Hidup Muhammad Natsir

Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada tahun 17 Juli 1908 yang merupakan anak nomor bungsu dari lima bersaudara. Ayah Muhammad Natsir bernama Sutan Saripado dan Ibu bernama Khadijah. Keluarga Natsir lahir dari keluarga sederhana, buktinya ialah kedua orang tua Natsir bekerja sebagai pegawai rendah, sewaktu kecil pernah tinggal menumpang di rumah seorang saudagar di kampung. Keluarga Natsir menempati sebelah kanan, sementara tuan rumahnya di sebelah kiri (Salim A Fillah, 2022: 385).

Saat usia Muhammad Natsir 8 tahun, Natsir mulai bersekolah di *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) adabiyah Padang. Sebuah sekolah partikelir yang di pimpin oleh H.Abdullah Ahmad. Hal itu disebabkan Natsir tidak diterima di sekolah pemerintah sebab diperuntukkan bagi anak-anak pegawai pemerintah sedangkan anak-anak dari kaum pegawai kecil, petani atau buruh diterima di HIS (Jarudin, 2020: 13) . Setelah tamat dari HIS Muhammad Natsir melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas (sekolah), zaman tersebut dinamakan *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs* (MULO).

Setelah tamat dari MULO, Natsir meneruskan pendidikannya di *Algemene Midelbare School* (AMS) dan lulus dengan nilai yang tinggi. Setamat dari sekolah AMS Natsir ikut aktif dalam organisasi yang membawanya terjun ke politik. Buktinya ialah Muhammad Natsir menolak tawaran beasiswa dengan memilih aktif berorganisasi bersama dengan Persatuan Islam (PERSIS) yang dipimpin oleh Ahmad Ahsan (Murjoko dalam Hasanudin&Jalil, 2019:35). Hal lain juga yang membuat Muhammad Natsir terjun ke politik pada tahun 1930 ialah diajak oleh ketua PSI cabang Bandung yaitu Sabirin untuk menjadi ketua Partai Sarekat Islam fakta nya ialah ketika

Natsir diwawancara ia bercerita, “sejak saat itu saya berkecimpung dalam politik. Apalagi saya lihat PNI begitu kuat”(Natsir dalam Lukman Hakim, 2019: 34). Hal ini menunjukkan Natsir tidak pernah menyerah untuk meneruskan pendidikan sampai selesai dan selama sekolah Natsir mulai aktif organisasi serta banyak mengenal tokoh politik

Pada saat usia muda, Muhammad Natsir sudah mulai menulis di media cetak seperti *Islam Sebagai Dasar Negara, Di Bawah Naungan Risalah, Pandai-pandai bersyukur, Marilah Shalat, Capita Selecta 1 dan II, Gubahlah Dunia dengan Amalmu, Islam dan Akal Merdeka, Hendak ke mana Anak-anak kita dibawa* dan masih banyak lagi (Tedy, 2016:41). Melalui karya ini, Natsir menjelaskan pendapat dan gagasan serta ide yang kelak akan dibaca pada generasi selanjutnya dan berdampak positif pada generasi muda saat ini.

3. Aktivitas Politik Muhammad Natsir 1930-1950

Adapun aktifitas Muhammad Natsir, yaitu :

- a. Sebagai Ketua perkumpulan *Jong Islamieten Bon* (KLJIB) pada tahun 1928-1932. Dari sinilah Natsir bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa seperti Prawoto Mangkusasmito, Mr.Mohammad Roem, Sultan Syahrir, Syafruddin Prawinegara dan Yusuf Wibisono. JIB adalah organisasi yang mempunyai anggota dari pemuda Islam dan pelajar MULO dan AMS.
- b. Kemudian, berkiprah menjadi Direktur Pendidikan Islam Bandung di Bandung pada tahun 1932-1942 dan dalam tahun yang sama Natsir memimpin organisasi Islam di Bandung yaitu Persatuan Islam (Persis).
- c. Setelah tahun 1942-1945, Natsir menjadi Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung atau dalam bahasa Jepang *Bandung Syiakusro* (Lukman Hakim, 2019: 55).

Kemudian, aktivitas lain Natsir di antaranya yaitu: sebagai pimpinan Partai Masyumi yang pernah berkunjung ke negara Timur Tengah hal ini menunjukkan Natsir adalah sosok yang bisa dipercaya dan bersahaja dengan siapa saja. Melalui aktifitas politik ini, Muhammad Natsir bisa mengembalikan aktifitas politik di Indonesia hidup kembali.

4. Pemikiran Politik Muhammad Natsir

Pemikiran Natsir tentang politik lebih condong dipengaruhi oleh keteguhan terhadap Islam. Adapun pemikiran Muhammad Natsir dalam perkembangan politik di Indonesia yaitu:

- a. Tentang dasar negara (pancasila)

Muhammad Natsir menyatakan dengan tegas, bahwasanya pancasila ada kaitannya dengan al-Qur'an dan Islam. Menurutnya pancasila yang sekuler tidak memiliki arti apa-apa bagi jiwa umat Islam karena pancasila tidak memiliki akar dalam hati mereka dan tidak merefleksikan landasan nilai-nilai spiritual yang dibimbing oleh wahyu Tuhan (Emy Setyaningsih, 2016 :89).

Muhammad Natsir tidaklah ingin merubah dasar negara dengan Islam. Melainkan memiliki pemikiran bahwa nilai-nilai sekuler jauh dari nilai-nilai agama yang merupakan bagian dari nilai pancasila, jika hal ini terjadi maka akan berdampak buruk bagi tatanan serta elemen politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Hubungan Negara dan Islam

Muhammad Natsir berpendapat bahwa terdapat berbagai individu dan kelompok untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Buktinya ialah Natsir menegaskan pendapatnya yaitu Islam memiliki hubungan dengan negara dan tidak bisa dipisahkan karena Islam meliputi semua aspek yaitu bersifat holistik (Al-qur'an dan hadist) (Natsir dalam Lubis, 2019: 49).

Berdasarkan ketiga pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan secara keseluruhan. Beliau berpendapat bahwa agama mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, Natsir menekankan pentingnya toleransi dan kebebasan beragama dan yakin bahwa semua agama harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Sedangkan agama dijadikan pedoman dalam membangun suatu negara karena agama bukan tentang suatu peribadatan antara makhluk dengan sang pencipta. Namun, sistem peradaban yang melingkup seluruh aspek secara sempurna sehingga sistem politik suatu negara dapat berjalan dengan damai.

c. Hubungan Demokrasi dan Islam

Kita ketahui bahwasanya di Negara Indonesia menganut demokrasi pancasila. Dalam kaitannya dengan agama Islam tidak mengenal sistem ini, sehingga Natsir menyatakan bahwa demokrasi yang diinginkan Islam serupa dengan demokrasi liberal, namun demokrasi Islam berdasarkan asas-asas yang tidak bisa dibantahkan, sehingga muncul istilah "*Theistic Democracy*" yaitu demokrasi yang berpegang teguh dengan nilai-nilai ketuhanan.

Hal lain juga disampaikan oleh Natsir sendiri dalam bukunya, Natsir mengatakan: apabila demokrasi itu telah merosot menjadi partai-kraji, atau menjadi kliek-kraji lengkap pula dengan segala main pencak dan sunglap di belakang layarnya" (Natsir, 1973:452).

d. Tentang Konsep Khilafah

Menurut pandangan Natsir, khalifah bukanlah syarat mutlak dalam pemerintah Islam, bukan *conditio sine quo non*. Namun yang terpenting ialah penguasa bisa bersikap arif dan menerapkan aturan-aturan Islam dengan baik dalam tatanan negara, baik secara teori maupun praktik. Kriteria untuk menjadi penguasa negara Islam adalah keimanan, sifat pembawaan, dan kemampuan untuk mengatasi semua kekuasaan yang sudah dipercayakan. Jadi, menjadi penguasa bukan hanya di ukur dari keturunan, pengetahuan rendah atau tinggi dan kekayaan saja. Rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mematahui aturan selama penguasa itu menjalankan kekuasaannya dengan baik (Hamzani & Arafik dalam Carisa, 2023:6). Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Natsir tentang syarat menjadi kepala negara Islam (khilafah) yakni akhlak, kecakapan, sifat, agamanya guna untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin bukan untuk pengetahuan saja ataupun semata-mata untuk bangsa dan keturunannya. Apabila penguasa negara terpilih, rakyat mempunyai kewajiban untuk mengikuti selama benar dalam menyelenggarakan kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan apabila pemimpin melanggar maka rakyat berhak memberikan koreksi, saran dan kritikan dengan prinsip musyawarah dan kekeluargaan yang tercantum dalam nilai-nilai pancasila.

e. Pemikiran M. Natsir dalam memperjuangkan kembalinya RIS ke NKRI

Ketika M. Natsir duduk di parlemen sebagai ketua fraksi Masyumi, ia mengambil inisiatif bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin fraksi lain dan mencapai kesepakatan dengan tokoh Partai Katholik yaitu Kasimo dan partai Kristen Indonesia yaitu A.M Tambunan. Akan tetapi, kebanyakan negara bagian berat untuk membubarkan diri dengan Republik Indonesia. Perjuangan M. Natsir tidak berhenti sampai menemu titik puncaknya. Kemudian, pada tanggal 3 April 1950 Mohammad Natsir menyampaikan pidato di parlemen dalam sidang pleno Republik Indonesia Serikat (RIS), sebagai anggota parlemen dari Partai Masyumi mengajukan usulan kembali ke NKRI dari negara RIS ciptaan Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1950, upaya tersebut kemudian diterima dan sosialisasikan perubahan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara yang berbentuk kesatuan atau NKRI (Hasanudin&Jalil, 2019:42).

Kemudian, pidato Muhammad Natsir ini akan dikenal mosi integral Muhammad Natsir. Adapun isi pidato Muhammad Natsir di perlemen berbunyi: "Inilah saudara ketua, menurut pendapat saya, arti mendasarkan politik kepada kehendak rakyat. Hanya dengan mengambil inisiatif kembali, yang telah dilepaskan oleh pemerintah selama ini, dapat diharapkan bahwa pemerintah terlepas dari posisi defensifnya seperti sekarang. Dengan begitulah mungkin timbul satu iklim pikiran yang lebih segar, yang akan dapat melahirkan elan nasional yang baharu, bebas dari bekas persengketaan yang lama, elan dan gembira membanting tenaga yang diperlukan dan selekas mungkin dapat disalurkan untuk pembangunan negara kita ini. Semuanya itu diliputi suasana nasional dengan arti yang tinggi serta terlepas dari soal atau paham *unitarisme, federalisme dan proporsionisme*"(Natsir, 1973:13). Pemikiran, perjuangan dan pengorbanan M Natsir dalam membangun Indonesia menjadi salah satu dukungan untuk perkembangan politik di tanah air.

B. Implementasi Pemikiran Muhammad Natsir Terhadap Perkembangan Politik Di Indonesia

1. Pembentukan Partai Masyumi

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh dari golongan muda maupun tua berbondong-bondong untuk menyuarakan aspirasi bahwa Indonesia sudah merdeka dari belenggu penjajahan. Termasuk semangat nasionalisme dalam mendirikan organisasi dan partai politik salah satunya adalah Partai Masyumi (Majelis Syuro' Muslimin Indonesia).

Partai Masyumi ialah satu-satunya partai yang berasaskan nilai-nilai Islam yang dibentuk pada awal kemerdekaan yang di dukung oleh organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah dan lain-lain. Dari dukungan brebagai organisasi mengantarkan Masyumi berkembang secara pesat dan menjadi salah satu partai yang besar di Indonesia (Siregar, 2013: 89).

Sejarah pembentukan Partai Masyumi bermula dari Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang merupakan organisasi Islam bentukan Jepang. Setelah MIAI dibubarkan oleh pemerintah Jepang, maka dibentuk Masyumi baru yang mayoritas dikuasai oleh generasi Muda Islam Indonesia. Masyumi menjadi wadah untuk menyatakan keluh kesah rakyat daripada menjadi alat propoganda Jepang (Jarudin, 2020: 42). Maka, pada tanggal 7-8 November 1945 diadakan kongres di Yogyakarta, diresmikan Partai Masyumi bentukan rakyat Indonesia yang banyak menguntungkan rakyat Indonesia.

Natsir ikut serta dalam memperkarsai kongres Umat Islam tersebut bersama sejumlah tokoh lainnya seperti Muhammad Roem, Abdul Wahid Hasyim, Prawoto Mangkusasmito dan H. Agus Salim dan menghasilkan keputusan pendirian partai masyumi untuk memperjuangkan suara rakyat di lapangan politik. Kemudian, Natsir terpilih menjadi ketua partai dan melalui gagasannya tentang menekankan nilai-nilai Islam dalam bernegara akan tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pancasila dan keberagaman. Fakta bahwa pada tahun 1945 Natsir masuk dalam jajaran pimpinan Pusat Masyumi sebagai anggota dan pada bulan Desember 1949 di Yogyakarta, Natsir terpilih menjadi ketua serta memegang jabatan ketua partai selama sepuluh tahun karena terus terpilih setiap diadakannya kongres (Dzulfikriddin, 2010: 41).

Ketika Muhammad Natsir terpilih menjadi ketua umum Partai Masyumi pada tahun 1945-1958, beliau aktif dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan persoalan-persoalan negara di parlemen. Sebuah fakta mengatakan bahwa Natsir adalah kunci meleburnya negara-negara bagian di tanah air serta merundingkan tokoh-tokoh partai lain dan tokoh dari negara bagian RIS agar kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Kemudian, upaya ini disepakati dalam sidang Dewan Perwakilan RIS pada tanggal 3 April 1950 dan dikenang sebagai “Mosi Integral Muhammad Natsir” untuk menandakan bahwa jasa beliau besar sebagai tokoh dari Partai Masyumi.

Dengan kepemimpinannya yang cukup banyak, Natsir dan teman-temannya sudah berhasil menjadikan Masyumi sebagai partai Islam terbesar di Indonesia saat pemilihan umum 1955 dan sejumlah tokoh masyumi menempati kedudukan penting dalam pemerintahan salah satunya Muhammad Natsir sebagai perdana menteri.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Muhammad Natsir dalam Partai Masyumi telah membawa suasana baru bagi perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran sosok Natsir di segala situasi partai dan tidak bisa terpisahkan, seluruh perjuangan Muhammad Natsir merupakan bagian perjuangan Masyumi. Pemikiran ini akan terlihat mewarnai politik Muhammad Natsir dalam Masyumi.

2. Mengajukan Mosi Integral

Muhammad Natsir di kancah politik Indonesia sebagai anggota perlemen beliau mengajukan usulan yakni kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 3 April 1950 di sidang pleno RIS. Kemudian, hasil usaha itu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa perubahan RIS menjadi NKRI (Hasanudin & Jalil, 2020:42).

Dan pada akhirnya, Muhammad Natsir membacakan pidato dihadapan para tokoh pada tanggal 3 April 1950 yang bermaksud *pertama*, Natsir menghimbau agar menjauh dari perbincangan tentang negara kesatuan unitarisme dan negara federalisme karena hal tersebut dapat membahayakan NKRI untuk meruntuhkan perjuangan rakyat sebagai usaha untuk menyelamatkan hasil perjuangan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, *Kedua* terdapat akibat yang tidak dapat dicegah dan harus diselesaikan masalah di Indonesia dan banyak negara bagian RIS yang ingin bergabung dengan Republik Indonesia (RI) karena mereka menyadari bahwa negara ini akan dijadikan permainan dan upaya untuk menjajah kembali Indonesia. Kemudian *ketiga*, Muhammad Natsir meminta izin kepada ketua untuk menyampaikan sedikit pandangan tentang RIS dan melakukan langkah untuk menyelesaikan persoalan di negara bagian hasil dari keputusan KMB, serta mengadakan Undang-undang

sementara dengan segala sifat-sifat yang baik. Selain itu beliau menyampaikan bahwa agar pemerintah Republik Indonesia dapat meredam pergolakan terutama di daerah Republik di pulau Madura, Sumatera dan Jawa. Selanjutnya *keempat* ialah persoalan di negara Indonesia yang baru merdeka banyak masalah yang dihadapi dan Natsir mengingatkan agar pemerintah RIS dan RI tidak melupakan persoalan tersebut. Karena sesungguhnya upaya mensejahterakan dan kemakmuran rakyat sudah cukup menderita selama kolonial dan alat-alat politik masih ada di daerah-daerah NKRI (Natsir dalam Juwita, 2021: 68).

Kelima, Muhammad Natsir meminta dengan sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan persoalan bentuk negara dilaksanakan berdasarkan keinginan rakyat pada umumnya. Terakhir, Muhammad Natsir meminta kepada pemerintah untuk lebih aktif dan cepat dalam menyelesaikan masalah kesatuan bangsa yang kemungkinan tidak terlepas dari dari perdebatan federalisme, unitarisme dan propinsialisme. Kemudian, mosi tersebut ditandatangani ramai-ramai yang mewakili 11 fraksi di Parlemen.

Tokoh tersebut ialah Hamid Algadri, Ir Sakirman, K. Werdayo, Mr A.M. Tambunan, Ngadiman Harjosubroto, Sahetapy Engel, Dr Cokronegoro, Moch Tauchid, Amelz dan H Sirajudin Abbas (Tabroni, 2015: 150). Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan isi pidato Muhammad Natsir memiliki pemikiran yang luas dan tajam, serta banyak menyinggung tentang pentingnya pemerintah menanggapi persoalan di negeri ini mengingat penderitaan rakyat selama ini. Kemudian, terus berupaya untuk mengatasi persoalan agar negara lain tidak semena-mena menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah merdeka di tahun 1945.

C. Dampak Pemikiran Politik Muhammad Natsir Dalam Perkembangan Sejarah Politik Indonesia

Adapun dampak dari pemikiran politik Mohammad Natsir yaitu:

1. Paham sekularisme menjadi terkikis di Indonesia diganti dengan nilai-nilai demokrasi pancasila, hal ini dibuktikan adanya pemilihan umum di Indonesia hingga sekarang.
2. Adanya partai politik di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan. Buktinya ialah Partai politik sebelum kemerdekaan seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Parindra dan Gerindra di Pematang Siantar (Junita, 2017: 14). Partai politik pada waktu itu dibubarkan akan tetapi para tokoh pemimpin bangsa tetap memperjuangkan partai tersebut. Sehingga di era zaman sekarang, terdapat partai politik.
3. Setelah adanya mosi integral Muhammad Natsir dalam penyampaian pidatonya pada tanggal 3 Juli 1950 dan diterima, maka Indonesia berubah menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik yang dirasakan saat ini.

Sistem pemerintah Indonesia dari federal menjadi perlemtenter. hal ini dibuktikan dengan Muhammad Natsir sebagai perdana menteri (Juwita, 2021:79).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemikiran Muhammad Natsir dalam perkembangan politik di Indonesia banyak menyuarakan gagasan dan ide untuk bangsa Indonesia yaitu, *pertama* pancasila yang harus dijauhkan dari sekularime, *kedua* agama harus dijadikan pedoman

dalam bernegara sehingga memiliki keterikatan atau hubungan, *ketiga* adanya hubungan demokrasi dan Islam yakni pengambilan keputusan dengan musyawarah dan *keempat* ialah seorang kepala negara (khilafah) yang memiliki kepribadian bisa mengayomi seluruh rakyatnya.

2. Muhammad Natsir mulai mengetahui dan terjun ke bidang politik di sebabkan beberapa faktor yaitu mulai dari dukungan dari keluarga, kepribadian dan keadaan keluarga yang membuat Natsir terlibat di bidang politik. Selain itu juga, Natsir berkarya melalui tulisan dan memuat pemikiran-pemikiran beliau. Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional bagi bangsa Indonesia yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui aktivitas politik, sebagai pendidik dan seorang ulama yang banyak memberikan sumbangsih dan dukungan untuk Indonesia dengan karya tulis dan pemikiran-pemikiran yang kuat.
3. Adapun dampak dari peranan Mohammad Natsir yaitu Paham sekularisme menjadi terkikis di Indonesia diganti dengan nilai-nilai demokrasi pancasila, Adanya partai politik di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan, Indonesia berubah menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik yang dirasakan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fillah, Salim A. (2022). *Kisah-Kisah Pahlawan Nusantara: menyelami sejarah Pahlawan Islam di Nusantara dengan berbagai latar belakang dan budaya*. Yogyakarta: Pro-U Media. Hal:383-398.
- Falamsyah, Sony. (2018). Pemikiran Politik Muhammad Natsir. *Jurnal Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. Vol 6, no 1.
- Hasanudin, Y. A & Jalil, H. A. (2019). *Mosi Integral Muhammad Natsir; Upaya Perpaduan Ummah dan Bangsa Dalam NKRI. Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher*.
- Hakim, Lukman. (2019). *Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jarudin. (2020). *Meninjau Sejarah Kisah Hidup Muhammad Natsir*. Sleman Yogyakarta: Deepublish.
- Juwita, Reni. (2021). Pemikiran Muhammad Natsir Dalam Memperjuangkan RIS ke NKRI 1945-1951. *Skripsi FKIP Universitas Jambi*
- Lubis, N. H. (2020). *Metode Sejarah*. Bandung; Setia Historica
- Lubis, H.S & Nasution, M. (2022). Pengaruh Partai Politik Terhadap Konstruksi Pemikiran M.Natsir. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 6, (1).
- Maryam. (2020). Perkembangan Majalah Al-Moechtar sebagai Media Dakwah Islam di Tasikmalaya Pada Tahun 1933-1940. *Jurnal Universitas Siliwangi*; hal 24-32.
- Natsir, M. (1973). *Capita Selecta*. Bulan Bintang
- Nurhuda Ahmad, Syaputri A. 2022. Perkembangan Historiografi Indonesia. *Jurnal Tarikhuna*, Volume 4. Nomor 4, hal 191-200
- Tabroni, Roni. (2017). *Komunikasi Politik Muhammad Natsir*. Yogyakarta: Suluh Media. Hal 62-63.
- Tedy, Armin. (2016). Pemikiran Politik Islam Muhammad Natsir. *Jurnal Al-Afkar*, Vol.5, (2).

- Syamsul, Dinar. (2020). Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies. *Jurnal Multidisciplinary*. Volume 4, No. Hal; 15
- Setyaningsih, E. (2016). Perjuangan dan Pemikiran Pemikiran Politik Muhammad Natsir (1907-1993). *Jurnal TAPIs*. Volume 12, (2).
- Sinurat, Y. J. (2017). Sejarah Partai Politik di Pematang Siantar (1927-1949). *Jurnal Sriwijaya Hostoria*. Volume 1. No 1; hal 11-18.
- Siregar, I.F. (2013). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partazi Masyumi (1945-1960). *Jurnal Thaqaifiyat*. Volume 14 (1).
- Wilaela. (2016). *Sejarah Islam Klasik*. Pekanbaru : Fakultas Ushuludin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Gaol, Duma & Seprina Reka. (2023). Ketatanegaraan Indonesia Dibawah Masa Pendudukan Jepang. *Jurnal Krinok Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi*. Vol 3 (2).
- Pasaribu, Hotman. (2023). PNI: Organisasi Politik Radikal Soekarno Dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1927-1931). *Jurnal Krinok Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi*. Vol 3 (2).